



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,
Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baratu

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhana WaTa'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

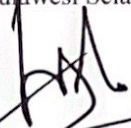
LKIP Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, dan juga dapat digunakan sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta penjelasan atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Besar harapan bahwasanya Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi atau bahan evaluasi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi demi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 2022

Bappelitbangda
Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala,

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Badan	1.
2. Kasubbag	2. 
3. Konseptor	3. 


Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19670427 199303 1 015

Bab I :

1. Cascading Kinerja
2. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
4. Susunan Organisasi
5. Isu-Isu Strategis
6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran
7. Tindak Lanjut atas LHE Sakip Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai institusi pemerintah daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

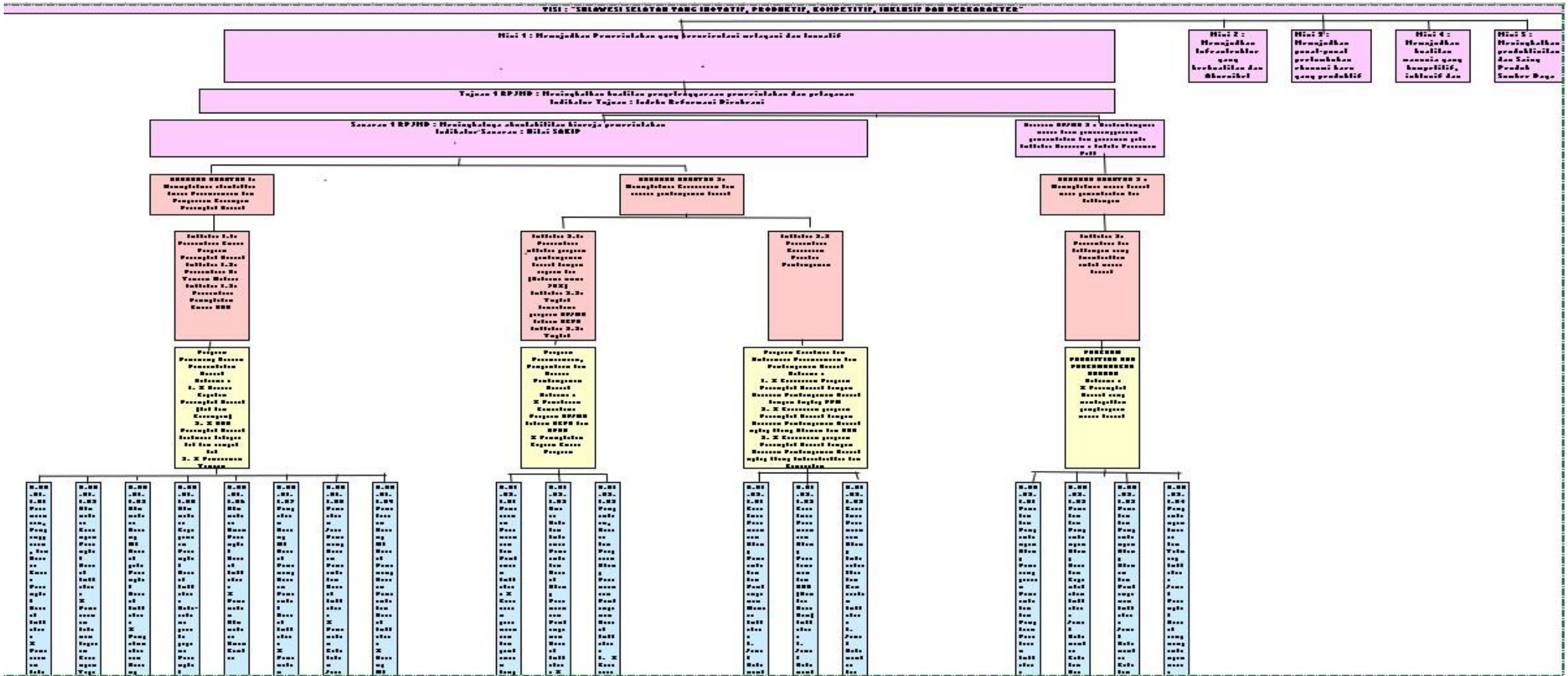
Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1. CASCADING KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda

Nomo 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Adapun Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

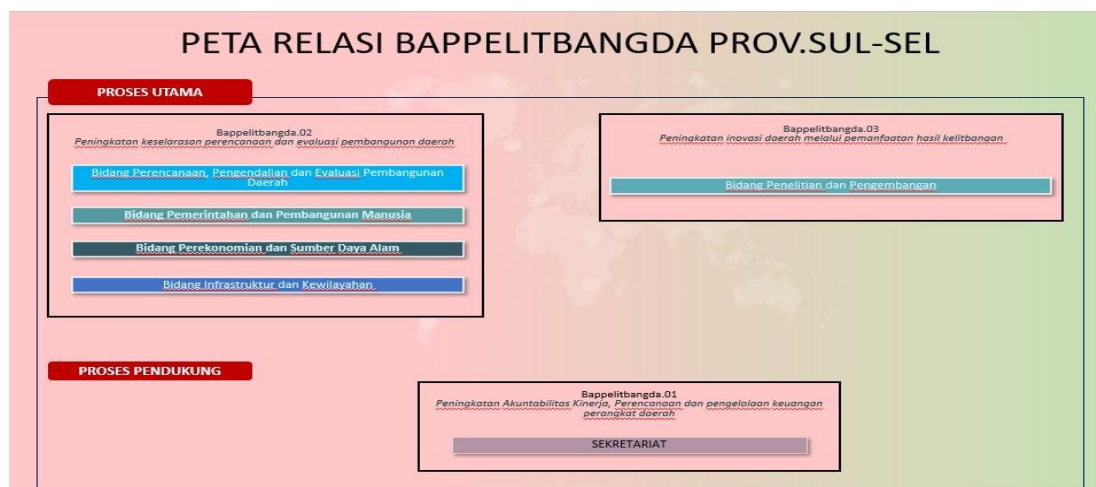
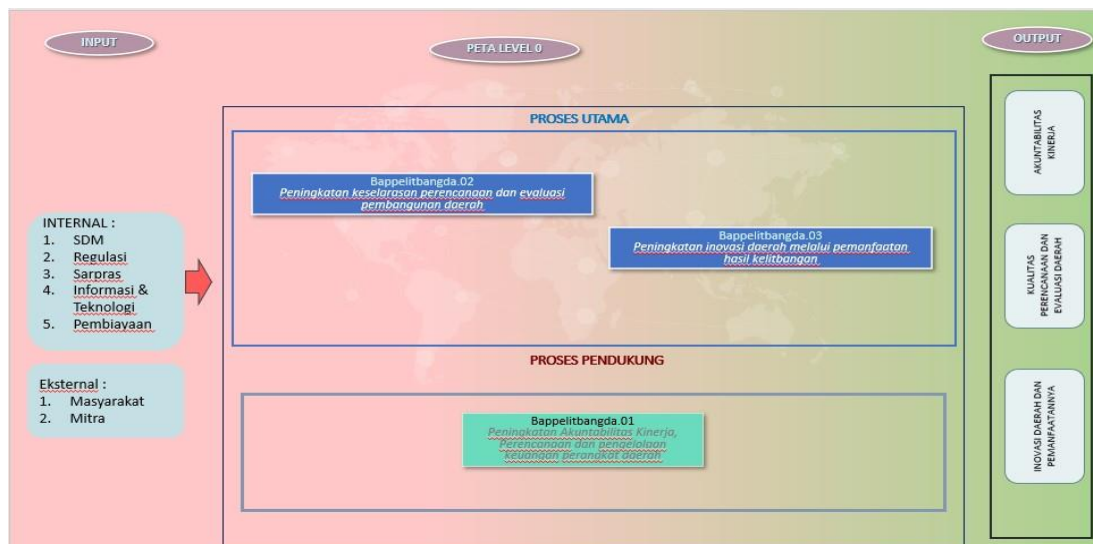
Gambar 1.1 Pohon Kinerja RPJMD



1.2. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Peta Proses bisnis adalah sebuah acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan kinerja. Hal tersebut, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka terkait hal tersebut Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

Gambar 1.2 Gambaran Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Prov. Sulsel



1.3. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai bentuk konsekuensi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diteruskan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 bahwasanya Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidnag Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

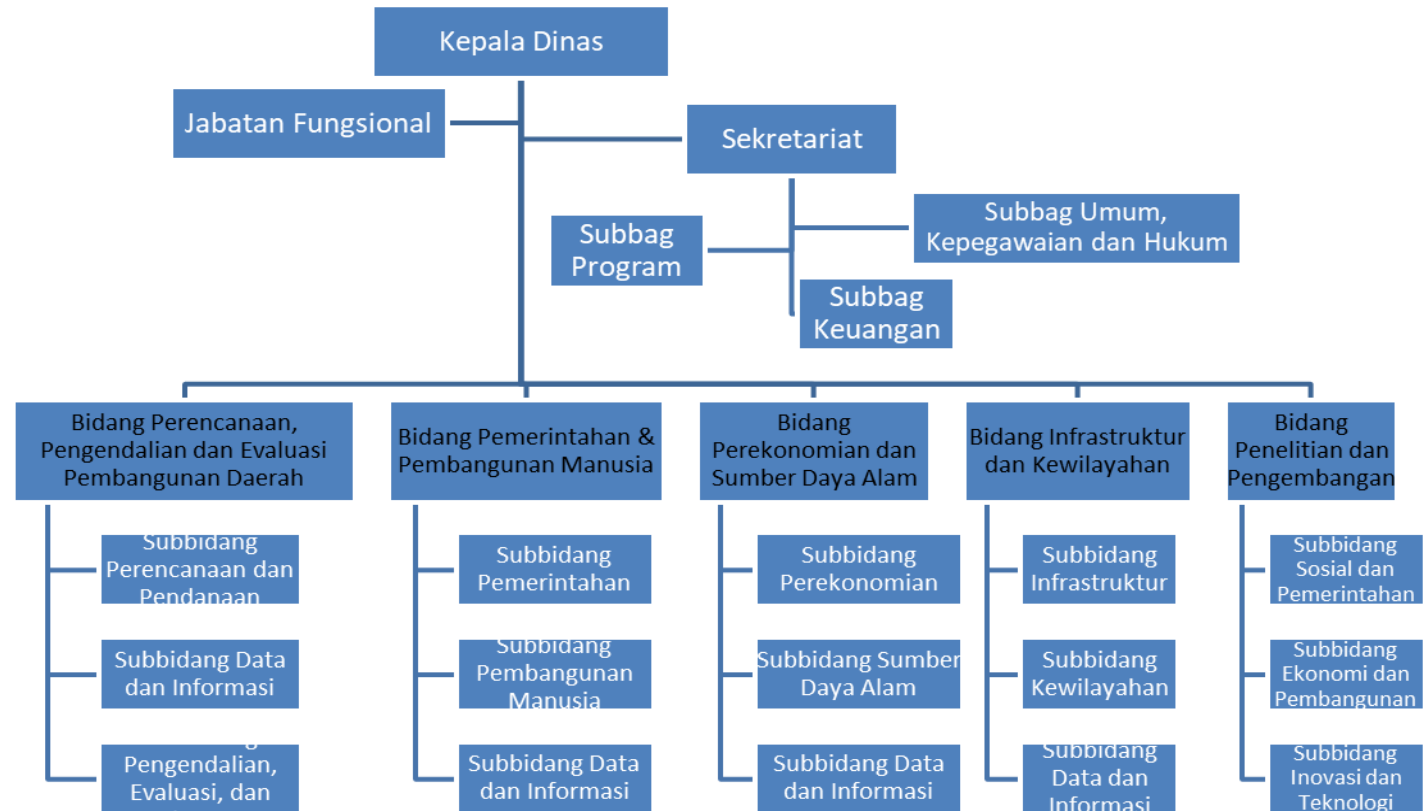
1.4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sejak Tahun 1982 yang telah mengalami penyempurnaan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Susunan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi;
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari;
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Pembangunan Manusia;

- c. Subbidang Data dan Informasi.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. terdiri dari :
 - a. Subbidang Perekonomian;
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Infrastruktur;
 - b. Subbidang Kewilayahan;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi
8. Jabatan Fungsional

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2019



1.5. ISU ISU STRATEGIS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur tentang identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi dalam perencanaan, dengan perumusan atau identifikasi masalah dilakukan terlebih dahulu dan kemudian perumusan isu strategis. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kemudian isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan dua urusan yakni urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2021, isu strategis Bappelitbangda memperhatikan kondisi atau hal yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan karena dapat memberi dampak yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dengan rumusan sebagai berikut:



1.6. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2021, jumlah pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 186 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Kualifikasi dan Jenis Kelamin Data Desember 2021

No.	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
A. Jabatan Struktural					
1.	Eselon 2	1	S2	1	
2.	Eselon 3	6	S3 :1 S2 :5	4	2
3.	Eselon 4	18	S2 : 14 S1: 4	11	7
B. Jabatan Pelaksana Substantif					
1.	Analisis	63	S3:1 S2:14 S1:38 D4:10	35	28
2.	Bendahara	2	S2: 1 S1: 1		2
3.	Penyusun	12	S2: 1 S1: 11	6	6
4.	Penata	5	S1:5	2	3
5.	Penelaah	2	S1:2	2	
6.	Verifikator	1	S1:1	1	
C. Fungsional Tertentu					
1.	Perencana	32	S3:1 S2:27 S1:4	10	22
2.	Peneliti	5	S1:5	1	4
3.	Analisis Kebijakan	5	S3:2 S2:3	3	2
4.	Perekayasa	2	S2:2	1	1
5.	Pustakawan	3	S2:1 S1:2		3
6.	Arsiparis	9	S2:3 S1:6	3	3
7.	Analisis SDM	1	S1:1		1
D. Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif					
1	Pengelola	5	S1:4 D4:1	2	3
2.	Pengadministrasi	17	S1: 1 D3:1 SMA:15	15	2

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. Bappelitbangda Prov. Sulsel 2021

Berdasarkan table diatas, sumber daya manusia Bappelitbangda sudah cukup memadai, dengan Pendidikan tertinggi adalah S3 (Doktor) dan Pendidikan terendah adalah SMA (Sekolah Menengah Atas). Adapun Pegawai dengan jabatan S3 mengisi jabatan structural, pelaksana substatif dan fungsional tertentu, sedangkan untuk SMA mengisi jabatan pelaksana pendukung/administrative. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 97 orang atau 52% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 89 orang atau 48% dari jumlah total pegawai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran, sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Aset pada Bappelitbangda Prov Sulsel per 31 Desember 2021

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	3	1	TANAH	1	534,597,040.00
			a. Tanah	1	534,597,040.00
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	2722	22,496,164,613.00
			a. Alat Besar		
			b. Alat Angkutan	66	5,779,928,200.00
			c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3	32,970,000.00
			d. Alat Pertanian	1	450,000.00
			e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1600	7,220,896,964.00
			f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	146	1,159,834,600.00
			g. Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
			h. Alat Laboratorium	185	901,679,733.00
			i. Alat Persenjataan	1	12,408,000.00
			j. Komputer	719	7,366,757,116.00
			k. Alat Eksplorasi		
			l. Alat Pengeboran		
			m. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
			n. Alat Bantu Eksplorasi		
			o. Alat Keselamatan Kerja		
			p. Alat Peraga		
			q. Peralatan Proses/Produksi		
			r. Rambu - Rambu	1	21,240,000.00
			s. Peralatan Olah Raga		

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga(Rp)
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	30	10,389,029,810.00
			a. Bangunan Gedung	29	10,189,829,810.00
			b. Monumen		
			c. Bangunan Menara		
			d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	199,200,000.00
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	8	943,859,700.00
			a. Jalan Dan Jembatan		
			b. Bangunan Air	2	29,600,000.00
			c. Instalasi	4	489,252,700.00
			d. Jaringan	2	425,007,000.00
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA	10	1,328,977,850.00
			a. Bahan Perpustakaan	10	1,328,977,850.00
			b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
			c. Hewan		
			d. Biota Perairan		
			e. Tanaman		
			f. Barang Koleksi Non Budaya		
			g. Aset Tetap Dalam Renovasi		
1	3	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
			a. Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	5	1	ASET LAINNYA	28	1,699,609,500.00
			a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
			b. Aset Tidak Berwujud	13	1,626,322,000.00
			c. Aset Lain-Lain	15	73,287,500.00
JUMLAH				28	1,699,609,500.00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel Tahun 2021

Tabel 1.3 Perbandingan Dukungan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Jumlah
2020	Rp. 67.291.548.453,-
2021	Rp. 63.328.657.212,-

Sumber : Bappelitbangda 2020

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp. 63.328.657.212,-, yang dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 3.962.891.241,-.

1.7. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2021

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
Surat Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3243/A.1/Itdaprov tanggal 12 Juli 2021		
I. Perencanaan Kinerja		
a.	Terdapat perbedaan pagu anggaran yang termuat dalam Tabel T.C 27 Perubahan Renstra dengan table VIII.2 Perubahan RPJMD 2018-2023	Perbedaan pagu anggaran terdapat pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, dan hal tersebut telah disesuaikan pada tabel T.C 27 Perubahan Renstra dengan tabel VIII.2 berdasarkan perubahan RPJMD 2018-2023.
	Rekomendasi : Memperbaiki pagu anggaran yang termuat dalam table T.C-27 Perubahan Renstra dengan table VIII.2 berdasarkan perubahan RPJMD 2018-2023	
b.	Terdapat indikator sub kegiatan yang tidak selaras dengan indikatornya	Terdapat 5 indikator sub kegiatan yang diminta untuk disesuaikan berdasarkan rekomendasi inspektorat, dan akan ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan selanjutnya.
	Rekomendasi : Indikator sub kegiatan disesuaikan dengan rekomendasi	
II. Pengukuran Kinerja		
a.	Indikator dan pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	Akan Menyusun Perjanjian Kinerja Staf yang menyesuaikan pada indikator kinerja organisasi/ atasannya dengan memperhatikan kriteria indikator yang SMART.
	Memperbaiki indikator dan pengukuran kinerja individu yang mengacu kepada IKU unit kerja	

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>organisasi/atasannya dengan memperhatikan kriteria indikator SMART, tersedianya alur perjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu), setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur, terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan, terdapat pengukuran pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya dan hasil pengukuran dapat diverifikasi secara berjenjang.</p>	
b.	<p>Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitoring tingkat capaiannya</p> <p>Melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV dengan melengkapi dan memperhatikan keselarasan target IKU dan PK eselon II, jadwal dan mekanisme atau SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodic, dokumentasi hasil monitoring serta tindak lanjut atas hasil monitoring</p>	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Eselon III dan IV pada setiap triwulannya, dan perbaikan selanjutnya akan menyiapkan dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik berupa notulen atau dokumentas rapat.</p>
III. Pelaporan Kinerja		
a.	<p>Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya</p>	<p>Akan lebih meningkatkan pemanfaatan Informasi kinerja sebagai bentuk tindak</p>

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>dipergunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi,serta peningkatan kinerja</p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan informasi kinerja dalam rangka sebagai tindak lanjut dalam upaya perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan capaian kinerja ke depan.</p>	<p>lanjut dalam berbagai upaya dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan</p>
b.	<p>Laporan Kinerja belum dilengkapi dengan perbandingan capaian target output tahun sebelumnya</p> <p>Rekomendasi : Menyajikan laporan kinerja dengan melengkapi capaian target output dan perbandingan dengan tahun lalu.</p>	<p>Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2020 telah menyajikan capaian kinerja output kegiatan.</p>
c.	<p>Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan hasil pengukuran sebagai pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>	<p>Akan berupaya untuk memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>
IV. Evaluasi Internal		

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
a.	<p>Pemantauan terhadap kemajuan dan hambatan atas pencapaian kinerja belum dilakukan.</p> <p>Rekomendasi : Melakukan pengidentifikasian, pencatatan, pengadministrasian kemajuan (progress) kinerja, serta Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pencapaian kinerja dan melaporkan hasil pemanfaatan tersebut kepada pimpinan</p>	<p>Telah dilakukan Rapat Evaluasi Triwulanan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengadministrasi kemajuan (progress) kinerja, serta Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pencapaian kinerja. Adapun rapat tersebut dipimpin oleh pimpinan unit kerja atau yang mewakili.</p>
b.	<p>Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi masih memerlukan penyempurnaan.</p> <p>Rekomendasi : Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, namun perlu penyempurnaan atas informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau yang telah diagendakan, menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda, Menyusun analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda, dan melakukan pengukuran yang memadai atas tentang keberhasilan dan</p>	<p>Akan Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi dengan menyampaikan informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau yang telah diagendakan, menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda, serta menganalisis memberi kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya agenda dalam Rencana Aksi dengan menyampaikan keberhasilan dan kegagalannya.</p>

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	kegagalan dari rencana atau agenda	
c.	<p>Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p>	Akan lebih meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata.
V. Capaian Kinerja		
a.	<p>Berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian kinerja tahun 2020 masih terdapat capaian kinerja sasaran dan kinerja output kegiatan yang belum memenuhi target dari yang ditetapkan</p> <p>Rekomendasi : Melakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap pencapaian target output dan outcome secara berkala sebagai bentuk bahan tindak lanjut perbaikan kinerja kedepan</p>	Akan meningkatkan pemanfaatan dan evaluasi terhadap pencapaian target output dan outcome secara berkala sebagai bentuk bahan tindak lanjut perbaikan kinerja kedepan.

Bab II berisi
2.1 Perencanaan Strategis
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2.3. Rencana Tahun Anggaran 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Tahun 2021, merupakan tahun yang dipenuhi dengan refocussing dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dikarenakan dampak pandemic Covid 19. Bappelitbangda sebagai Organisasi Perangkat Daerah tetap berupaya untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka Panjang Sulawesi Selatan.

Berikut disampaikan tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang terlihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
1.	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel			
2.	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	2. Peningkatan Jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah
Misi 3 : Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah	3. Pengembangan komoditas sector unggulan pada Kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		5. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	4. Pembangunan dan Pengembangan sector pariwisata dan ekonomi kreatif
			5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
4.	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	6. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan Pendidikan menengah
		7. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan dan olahraga
		8. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
		9. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			
5.	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sector unggulan daerah	10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi matirim
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	11. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Melihat dari table diatas, Bappelitbangda mendukung pada 1 tujuan, 2 sasaran pada misi 1 Pemerintah Daerah, adapun sasarannya yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018- 2023. Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
<i>Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter</i>									
<i>Misi : Pemerintahan yang Berorientasi melayani, Inovatif dan Berkarakter</i>									
<i>Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan</i>									
<i>Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan</i>									
<i>Indikator Sasaran RPJMD : Nilai SAKIP Provinsi</i>									
1.	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	92%	94%	95%	96%	97%
				Nilai SAKIP OPD	80%	80%	80%	81%	83%
				% Persentase	-	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Temuan Material					
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Prosentase keselarasan rencana pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RK PD	100%	100%	100%	100%	100%
				Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	96%	96,5%	97%
				Prosentase Indikator Program Pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%	92%	92%	92,5%	92,5%	93%
				Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran RPJMD : Berkembangnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public									
Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Pelayanan Publik									

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.			Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	-	-	20%	30%	40%

Sumber : Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

2. 1. 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappelitbangda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun. Adapun strategi dan kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan dalam **tabel 2.3** sebagai berikut:

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1) Peningkatan kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan 2) Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	1. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (laki-laki dan perempuan) 2. Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda
(2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	1. Peningkatan monitoring hasil evaluasi program-program pembangunan daerah melalui Simonev 2. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki agar bisa terintegrasi dengan sistem aplikasi dari luar.
		3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern	3. Membangun link antar sistem informasi yang berada di luar Bappelitbangda dan didalam Bappelitbangda

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan	4. Mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan Universitas atau Kementerian terkait
		5. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Provinsi dan Kab/ Kota	5. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki 6. Menyempurnakan forum-forum perencanaan dengan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian dan Stakeholder terkait 7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pusat dan Stakeholder terkait
		6. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah antar Tingkatan Pemerintahan	8. Menyusun Standar atau panduan dalam Verifikasi Dokumen Perencanaan 9. Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target Program/ Kegiatan RPJMD dan RKPD 10. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	6) Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	7. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan

Sumber : Renstra Perubahan Bapelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023

2. 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini juga memuat a) sasaran strategis, b) Indikator kinerja utama organisasi, dan c) target kinerja dan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/1360/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	$\frac{\text{Jmlh Program RKPD thn berkenan}}{\text{Jmlh prog RPJMD}} \times 100\%$	Bappelitbangda Prov. Sulsel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
pembangunan daerah			yang harus dilaksanakan Tahun berkenan	
	Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	<u>Jmlh program APBD thn berkenan</u> x 100% Jumlah Prog RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenan	Bappelitbangda Prov. Sulsel
	Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	Persen	<u>Jmlh Indikator program yang mencapai 75%</u> x 100% Jumlah Indikator Program	Bappelitbangda Prov. Sulsel
	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	Persen	<u>Prioritas pembangunan Daerah</u> x 100% prioritas pembangunan nasional	Bappelitbangda Prov. Sulsel
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	Persen	<u>Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam inovasi daerah</u> x 100% jumlah hasil kelitbangan	Bappelitbangda Prov. Sulsel

Sumber : SK IKU Perubahan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

Perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%
			Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	96%
			% Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>outcome</i>) minimal 75%	92,5%
			% kesesuaian prioritas pembangunan	100%
		Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (evaluasi Dokumen Perencanaan)	95%
			Nilai SAKIP OPD	80%
			% Temuan Material	0,06%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Bappelitbangda Prov. Sulsel

2. 3. Rencana Tahun Anggaran 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Bappelitbangda Provinsi melaksanakan kegiatan dengan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 74.448.808.539 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 67.142.745.639 dan Belanja Modal Rp. 7.306.061.900 kemudian terjadi *refocusing* anggaran sebanyak 2 kali dan perubahan anggaran sebanyak 1 kali. Adapun dengan melalui mekanis perubahan APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 63.355.617.212 dengan rincian belanja operasi Rp. 61.315.403.012 dan belanja modal Rp. 2.040.214.200,- .

Anggaran belanja Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang dialokasikan ke sasaran Strategis adalah tercantum dalam **tabel 2.6** sebagai berikut :

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Rp. 20.661.797.480,-	33%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangdan	Rp. 4.375.028.600,-	7%	Program Pengendalian dan Pengembangan Daerah
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 38.318.791.132,-	60%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
JUMLAH		Rp. 63.355.617.212,-	100%	Bappelitbangda

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021

Bab III berisi
3.1 Capaian Kinerja
Tahun 2020
3.2 Evaluasi dan
Analisis Capaian
Kinerja Sasaran
Strategis
3.3. Realisasi
Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu Organisasi.

Adapun Bappelitbangda Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2021. Dengan perhitungan Capaian Kinerja didapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi Target Rencana}}{\text{Target Rencana}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijelaskan pada tabel 3-1.berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tahun 2021 merupakan Tahun ketiga dalam Perencanaan Jangka Menengah, dan merupakan tahun perubahan dimana terjadi Perubahan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang diteruskan dengan Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023. Adapun dikeranakan terjadi perubahan tersebut, maka terdapat beberapa indikator sasaran Bappelitbangda Tahun 2021 yang tidak terdapat pada indikator sasaran Tahun 2020, sehingga terdapat beberapa kinerja antara tahun 2020 dan 2021 yang tidak dapat dibandingkan.

Sebagai implemantasi dari **Keputusan Kepala Badan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/1360/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**, maka hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian IKU Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
		Tingkat Konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	96	100	104
		% Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	%	92,5	90,6	98
		% Kesesuaian prioritas pembangunan	%	100	100	100
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%	20	20	100

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2020

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2021

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi program RPKMD kedalam RKPD	%	100	100	100	SANGAT TINGGI
		Tingkat Konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	96	100	104	SANGAT TINGGI
		% Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%	%	92,5	90,6	98	SANGAT TINGGI
		% Kesesuaian prioritas pembangunan	%	100	100	100	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangdan	Prosentase hasil kelitbangdan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%	20	20	100	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	%	95	146,22	154	SANGAT TINGGI
		Nilai SAKIP OPD	%	80	80	100	SANGAT TINGGI
		% Temuan Material	%	0,06	0,06	100	SANGAT TINGGI

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2021

Bappelitbangda memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021, persentase capaian sebesar 107% dengan 1 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 :

3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 1

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -1 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran ke – 1 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Sasaran ke 1, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Indikator	: 1. Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD 2. Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD 3. % indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75% 4. % kesesuaian prioritas pembangunan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2020)	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Tingkat konsistensi program RPJMD	100%	100	100	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2020)	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
	kedalam RKPD						
2.	Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	96%	96	100	$(100/96) \times 100\% = 104\%$	100	104%
3.	% indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	98%	92.5	90,6	$(90.6/92.5) \times 100\% = 98\%$	93	97%
4	% Keseuaian prioritas pembangunan	100%	100%	100%	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					99.5%		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100%**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat **226 (dua ratus dua puluh enam) Program** dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 terdapat **223 (dua ratus dua puluh tiga) Program**. Hal tersebut juga dapat dilihat Laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan

juga pada <https://e-planning.sulselprov.go.id/rkpd/contents/admin/#/beranda>.

Adapun gambaran dari indikator pada sasaran ke-1 ini sebagaimana yang terdapat di eplanning, sebagai berikut :

Gambar 1

Kode	Nama Perangkat Daerah	Prog/Keg/Subkeg RENCIRA yang memiliki Pagu di tahun Rencana				Prog/Keg Rancangan Akhir ROPDRENA				Prog/Keg Final ROPDRENA			
		Prog	Keg	Subkeg	(Rp)	Prog	Keg	Subkeg	(Rp)	Prog	Keg	Subkeg	(Rp)
4.01.0.00.0.00.31.00	Biro Organisasi	2	10	33	8.050.296.868.00	2	10	33	8.050.296.868.00	2	10	33	8.050.296.868.00
4.01.0.00.0.00.32.00	Biro Umum	1	10	44	195.136.096.220.00	1	10	44	195.136.096.220.00	1	10	44	195.136.096.220.00
4.01.0.00.0.00.33.00	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	22	7.766.057.154.00	1	8	22	7.766.057.154.00	1	8	22	7.766.057.154.00
4.01.0.00.0.00.52.00	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	3	12	23	6.955.969.221.00	3	12	23	6.955.969.221.00	3	12	23	6.955.969.221.00
4.01.0.00.0.00.53.00	Biro Pengadaan Barang/jasa	2	7	17	3.361.223.584.00	2	7	17	3.361.223.584.00	2	7	17	3.361.223.584.00
4.02.0.00.0.00.27.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	18	101	382.735.706.000.00	2	18	101	382.735.706.000.00	2	18	101	382.735.706.000.00
5.01.5.00.0.00.51.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	62	67.711.128.338.40	4	18	62	67.711.128.338.40	4	18	62	67.711.128.338.40
5.02.0.00.0.00.45.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	63	2.510.029.352.682.00	3	14	63	2.510.029.352.682.00	3	14	63	2.510.029.352.682.00
5.02.0.00.0.00.46.00	Badan Pendapatan Daerah	3	12	81	160.326.574.546.00	3	12	81	160.326.574.546.00	3	12	81	160.326.574.546.00
5.03.0.00.0.00.21.00	Badan Kepegawaian Daerah	2	12	83	28.015.806.539.33	2	12	83	28.015.806.539.33	2	12	83	28.015.806.539.33
5.04.0.00.0.00.22.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	9	36	37.570.465.796.00	2	9	36	37.570.465.796.00	2	9	36	37.570.465.796.00
5.06.5.07.0.00.34.00	Badan Penghubung Daerah	2	8	18	21.382.302.290.00	2	8	18	21.382.302.290.00	2	8	18	21.382.302.290.00
6.01.0.00.0.00.26.00	Inspektoral Provinsi Sulawesi Selatan	3	11	52	52.473.385.030.00	3	11	52	52.473.385.030.00	3	11	52	52.473.385.030.00
8.01.0.00.0.00.25.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	58	24.004.312.068.00	6	13	58	24.004.312.068.00	6	13	58	24.004.312.068.00
		226	650	2.638	10.880.317.833.086.73	223	638	1.995	10.840.041.942.391.73	223	638	1.995	10.840.041.942.391.73

Sumber : <https://eplanning.sulselprov.go.id>

- ❖ Tabel 3.4 menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD sebesar 100%**.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 terdapat **223 (dua ratus dua puluh tiga) Program** dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat **223 (dua ratus dua puluh tiga) Program**. Hal tersebut juga dapat dilihat pada <https://e-planning.sulselprov.go.id/ppas/contents/admin/#/beranda>.

Adapun capaian kinerja sasaran ke-1, indikator ke-2 mengalami kenaikan sebesar 4% jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021. Hal ini berarti indikator pada sasaran strategis sudah optimal dalam memenuhi target pencapaian.

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan Rapat-rapat guna klarifikasi hasil finalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

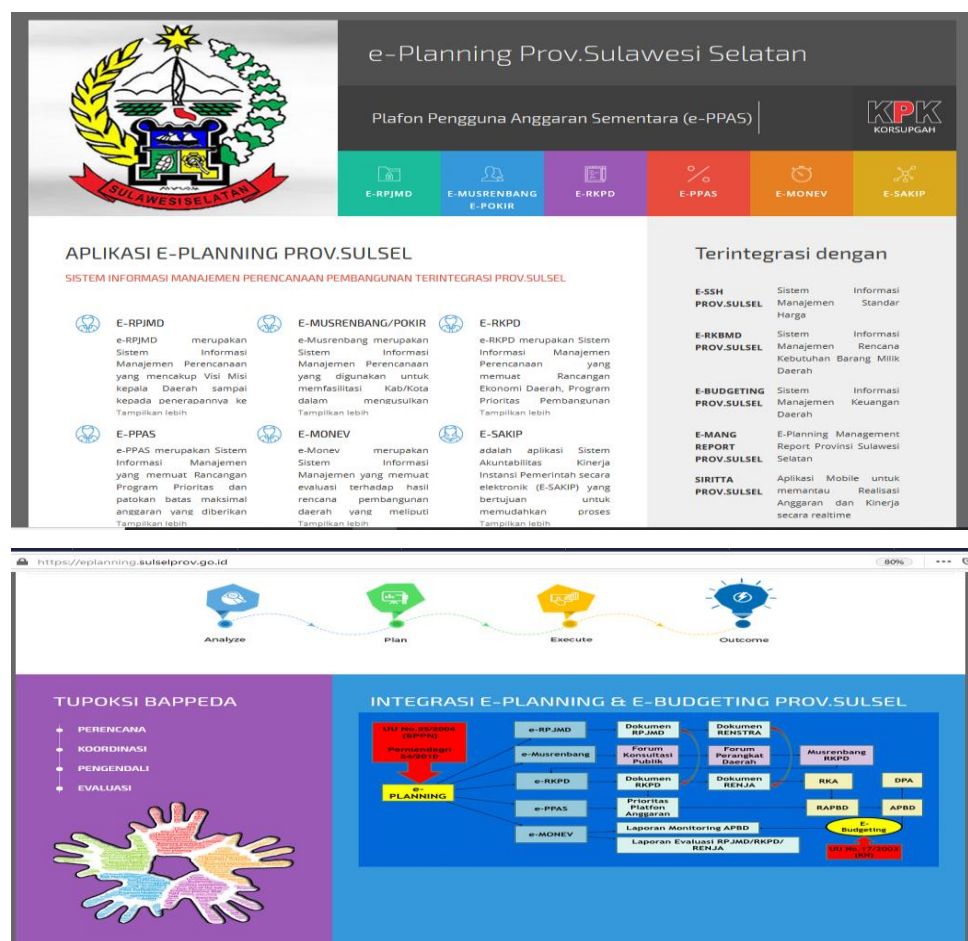
Gambar 2



2. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (<https://eplanning.sulselprov.go.id/>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan di Sulawesi Selatan, Sistem ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem anggaran, asset, laporan dan evaluasi. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai dengan saat ini telah mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, sejak penyusunan RPJMD sampai dengan KUA PPAS. Aplikasi ini pun selalu mengalami pengembangan dari tahun ke tahun, yang berdampak kepada kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Gambar 3 Aplikasi e-planning



- ❖ Data hasil evaluasi kinerja sasaran ke-1, indikator 3, dengan indikator kinerja Prosentase indikator **program pembangunan daerah dengan hasil tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%** sampai dengan **akhir Januari** sebesar 90,6%. Jika dibandingkan kinerja yang ingin dicapai sebesar 92.5%, maka capaian ini rendah. Terdapat 144 (seratus empat puluh empat) Indikator Program Prioritas yang capaian hasilnya mencapai minimal 75% dari 159 (seratus lima puluh sembilan) program prioritas. Banyak factor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai, dan sebagian besar merupakan factor eksternal. Salah satunya adalah terjadinya pandemic covid-19 menyebabkan dilakukan realokasi anggaran pada semua perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga alokasi anggaran yang rencana digunakan untuk mencapai indikator menjadi berkurang.

Adapun beberapa target dan realisasi dari indikator program prioritas tersebut, beberapa diantaranya adalah yang tersebut pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5 Gambaran Target dan Realisasi Program Prioritas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Prioritas)						
1	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	%	54,25	80,00	147,5%	Melampaui Target
2	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK (Prioritas)	%	80,00	81,00	101,3%	Melampaui Target
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)						

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
3	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	%	33,00	4,60	14%	<i>refocusing</i> anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19.
4	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	87,00	75,00	93%	Pandemi Covid 19
5	Persentase Penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100%	Sesuai target
6	Persentase Penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100%	Sesuai target
7	Persentase anak yang mendapatkan asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	6,50	*4,50	69%	Data sementara
8	Persentase ibu hamil yang mendapatkan asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	12,00	38,48	320.7%	Melampaui Target
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)						
9	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target
10	Persentase tenaga medis yang tersertifikasi (Prioritas)	%	40,00	71,34	178,4%	Melampaui Target

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
11	Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas)						
12	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	%	77,00	76,00	98,7	
13	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Prioritas)						
14	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100%	Sesuai target
15	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
16	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (Prioritas)	%	72,30	70,01	97%	
17	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat) (Prioritas)	%	42,72	74,53	174.5%	Melampaui Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
18	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang (Prioritas)		0,8	0,8	100%	Sesuai target
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (Prioritas)						
	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman (Prioritas)	%	91	93,98	103,3%	Melampaui Target
	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman (Prioritas)	%	60	195,9	326,5%	Melampaui Target
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Prioritas)						
	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan (Prioritas)	%	72,92	73,00	100,1%	Melampaui Target
	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri (Prioritas)	%	75,00	81,25	108,3%	Melampaui Target
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (Prioritas)						
	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan (Prioritas)	%	3,91	5,60	143,2%	Melampaui Target
	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	58,78	61,58	104,8%	Melampaui Target
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)						
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah (Prioritas)	%	3,95	3,88	98%	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (Prioritas)						
	Cakupan limbah yang dikelola (Prioritas)	%	97,05	16,79	17%	Perubahan kebijakan terkait limbah
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani (Prioritas)	%	72,00	82,32	114,3%	Melampaui Target

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Prioritas)						
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) (Prioritas)	%	1,51	1,51	100%	Sesuai target
	Persentase Posyandu aktif (Prioritas)	%	99,89	99,91	100,02%	Melampaui Target
	Persentase PKK aktif (Prioritas)	%	100	100	100%	Sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (Prioritas)						
	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang	1.280.000	1.355.919	105,93	Melampaui Target
	Jumlah pelabuhan strategis provinsi (Prioritas)	Lokasi	11	11	100%	Sesuai target
	Persentase pelabuhan yang beroperasi (Prioritas)	%	35,00	10,00	29%	Tidak ada pengalihan status asset dari pusat
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) (Prioritas)						
	Cakupan UMKM yang diberdayakan (Prioritas)	%	7,00	15,00	214.29%	Melampaui Target
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Prioritas)						
	Jumlah Realisasi PMA (Prioritas)	Rp. Triliun	3,50	2,85	81.43%	
	Jumlah Realisasi PMDN (Prioritas)	Rp. Triliun	4,50	10,78	239.56%	Melampaui Target
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Prioritas)						
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Prioritas)	Milyar Rupiah	8.852,48	12.668,91	143.11%	Melampaui Target
	Produksi perikanan tangkap (Prioritas)	Ton	396.992,3	416.076,4	104.81%	Melampaui Target
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Prioritas)	%	23,89	18,47	77%	

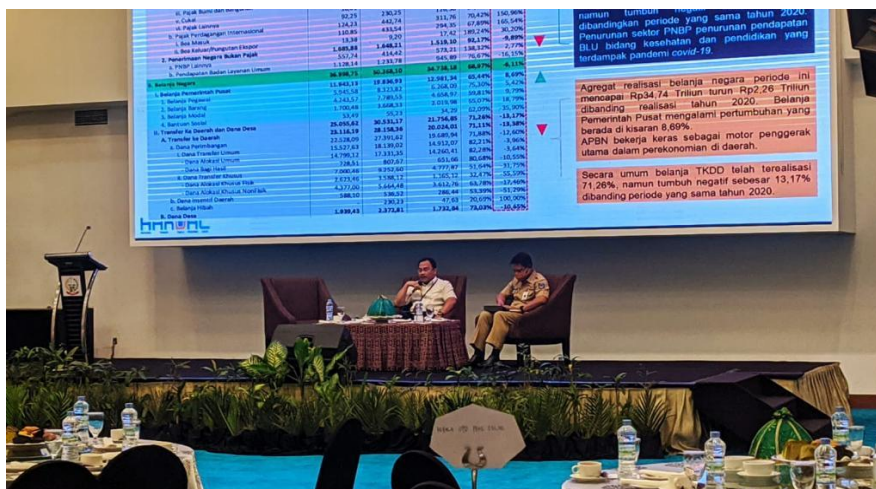
Sumber : RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2023

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan Rapat-rapat guna Evaluasi Program dan Kegiatan

Gambar 4





2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang terdiri dari e-monev APBD, Penilaian Kinerja dengan alamat akses <https://eplanning.sulselprov.go.id/monev> yang terintegrasi dengan E-Sakip. Sistem informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kerjanya. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Gambar 5 Aplikasi Simonev

Ra	Nama OPD	P	K	S	R	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	(%) Psk	Dua Dstn Belum diiklankan di Bulan ini
1	Biro Kesegitaraan Rakyat	2	9	9	32	1.293.935.281.752,00	1.283.627.182.512,00	99,19%	99,71%	11.508.094.240,00
2	Dinas Perputakaan dan Kearsipan	4	15	41	69.160.042.438,00	68.376.848.498,00	99,89%	99,98%	789.193.940,00	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	64	2.082.702.147.267,00	2.051.841.643.869,85	98,52%	98,96%	30.860.503.397,15	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	30	16.514.212.592,00	16.256.750.137,00	98,44%	98,76%	257.462.455,00	
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	16	32	33.399.909.466,00	32.772.032.864,00	98,12%	100%	627.876.602,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4	15	47	43.599.837.080,00	42.518.117.047,00	97,52%	98,3%	1.080.920.033,00	
7	Dinas Perhubungan	4	18	44	83.375.388.214,00	81.090.265.468,00	97,26%	98,67%	2.285.126.746,00	
8	Dinas Perencanaan dan Administrasi Pemerintahan	3	9	13	6.112.096.512,00	5.942.807.839,00	97,22%	100%	169.188.673,00	
9	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4	16	53	67.176.911.538,00	65.261.193.317,00	97,16%	98,46%	1.906.718.221,00	
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	9	37	31.698.085.883,00	30.762.565.146,11	97,14%	99,89%	935.520.736,89	

- ❖ Tabel 3.4 menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **% kesesuaian prioritas pembangunan** sebesar 100%.

Mengacu pada tema focus dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 sebagai mana pada tabel berikut

Tabel 3.6 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai/Angka)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi (Nilai)
					Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)
				Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
		Sekolah (Tahun)	Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)		
		Umur Harapan Hidup (Tahun)			Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		Meningkatnya Kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%/ADHK)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan BerkeadILAn (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)
			PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)			Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Gini Ratio (Periode September)	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	Laju pertumbuhan PDRB KTI (persen/ Tahun)
		Indeks Wiliamson		Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi	Perkembangan status pembangunan desa
	Berkembangnya pembangunan desa	Rata-rata Nilai Indeks Pembangunan Desa (%) Desa Mandiri			Penurunan angka kemiskinan desa (persen)
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah	Meningkatnya Pembangunan	Memperkuat Infrastruktur untuk	Meningkatnya konektivitas untuk	Persentase kondisi mantap jalan

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
	untuk akselerasi pertumbuhan	Infrastruktur		mendukung Pembangunan Ekonomi dan	mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan air (% / ADHK)	Pelayanan Dasar (PN 5)		Penurunan Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar 2010 (%) Volume tampungan air perkapita (m ³ / kapita)
4.	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi	Meningkatnya kinerja ekonomi makro	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan	Laju pertumbuhan PDRB KTI (persen/tahun)
			PDRB Perkapita			Persentase penduduk miskin

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
perlindungan sosial		AHB (Rp)	kesenjangan dan menjami pemerataan (PN2)	masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	KTI (persen) 3
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)			IPM KTI
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) (Periode Agustus)			Penurunan angka kemiskinan Desa (%)
	Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)			Rata rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Nasional (KPPN)
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
	penduduk	sosial	Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)		(%)
		Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)
	Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa
					Rasio kewirausahaan nasional
5	Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis kualitas	Meningkatnya kualitas	IKLH	Membangun Lingkungan Hidup, Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo (IKLH)

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	lingkungan hidup		Meningkatkan	Hidup	
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Tom CO ₂ Eq)	Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	Meningkatnya Capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah (GRK) terhadap baseline	Persentase penurunan emisi GRK (%)
	Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi PDB Industri Pengolahan Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa Rasio kewirausahaan nasional
6 Peningkatan kualitas	Meningkatkan	Nilai SAKIP	Memperkuat	Meningkatnya kualitas	Persentase Instansi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
reformasi birokrasi dan tata Kelola serta pelayanan publik	kualitas reformasi birokrasi dan tata Kelola serta pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi Kategori Baik keatas
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik			Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B keatas atas SAKIP (%)

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023**

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-1, ke-2 dan ke-4 maka dapat dilihat bahwasanya Tahun Kedua Renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%. Besar upaya Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja terhadap target Renstra 2023.

Adapun untuk capaian indikator ke-3 yaitu tidak mencapai target yang ingin diraih, yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya adalah perubahan kebijakan dan dan efek pandemi *covid 19* sehingga target dari indikator tersebut tidak tercapai.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdapat di Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah.

Tabel 3.7

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber

Sasaran	Program/ Kegiatan
	Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Rp. 20.661.797.480	Rp. 18.506.928.140	90%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp18.506.928.140,- atau 90% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99.5%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,5% , seperti yang digambarkan pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Tingkat efisiensi sasaran ke-1

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	99,5%	90%	9,5%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Komitmen pimpinan/ para pemangku kebijakan di daerah terhadap program.
- Terdapat konsistensi dalam implementasi program
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait.

- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas pembangunan.

b. Permasalahan :

- Terjadinya *recofussing* anggaran sebagai dampak dari penanganan pandemic covid 19, sehingga alokasi dana untuk pembangunan tidak maksimal.
- Perubahan Peraturan di tingkat pusat sehingga memerlukan beberapa penyesuaian.
- Keterlambatan OPD/ Unit Kerja dalam menyusun dan melakukan penginputan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang mana pada Evaluasi Renja tersebut memuat capaian setiap Program (*Outcome*).
- Terjadi perubahan-perubahan Kebijakan Nasional sehingga menyebabkan indikator program di beberapa Perangkat Daerah tidak mencapai target.

Solusi :

- Menyediakan data pembangunan daerah yang valid dan mudah diakses
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah baik dari sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, Program, kegiatan dan Sub kegiatan.
- Meningkatkan evaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah.

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -1 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 2 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sasaran ke 5, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan
Indikator	: % hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-5

No	Indikator	Baseline 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	n/a	20	20	$(20/20) \times 100\% = 100\%$	40%	50

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator % hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah sebesar **100%**.

Terdapat 2 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah dari total 10 penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2020.

Adapun judul dari 2 kegiatan penelitian dan, pengkajian dan pengembangan yaitu :

1. Uji Adaptasi Bibit Unggul dan Deteksi Molekuler Penyakit Penting pada ulat sutera (*Bombyx mori L.*) dengan lokasi penelitian Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Universitas Hasanuddin;
2. Pengembangan Murbei Unggul untuk Peningkatan Kualitas Kokon Ulat Sutera dengan lokasi penelitian Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Wajo.

Adapun judul inovasinya adalah “Kajian Kolaborasi Dalam Mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan”, inovasi kolaborasi ini dapat dikategorikan dalam inovasi tata Kelola pemerintahan yang bertujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder dalam pengembangan komoditas sutra. Yang dimaksudkan pada poin ini adalah Pemerintah

berupaya untuk menentukan pihak individu, kelompok, maupun komunitas terkait dalam pengembangan komoditas sutra.

- b. Memahami potensi, persoalan, tantangan tren, dan peluang pengembangan komoditas sutra dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai (value chain analysis). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengambilan kebijakan sehingga tepat guna.
- c. Mengidentifikasi kebijakan (daerah dan nasional) dan faktor lain yang berpengaruh positif dan negatif dalam pengembangan komoditas sutra.
- d. Merumuskan agenda kebijakan berbasis bukti dan program intervensi pengembangan komoditas sutra yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial serta hubungan antar pemerintahan (intergovernmental relation/multilevel). Memperbaiki teknis yang bertujuan memacu produksi komoditas Sutra Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan produksi komoditas Sutra Sulawesi Selatan.
- e. Diseminasi hasil kajian rantai nilai komoditas sutra kepada pemangku kepentingan strategis, guna membangun pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan.
- f. Meningkatkan kualitas bahan benang sutra lokal.
- g. Mempertahankan dan memperbaiki kinerja atribut-atribut yang bisa memastikan perluasan pasar produk sutra. Hal ini dimaksudkan untuk menjajakan produk sutra disekala nasional bahkan internasional.
- h. Mengatasi persoalan pemasaran dan ketimpangan di sektor hilir. Hal ini dimaksudkan untuk mengsejahterkan pemilik-pemilik toko kecil agar bisa bertahan dari tekanan harga jual dari pengusaha tenun besar.

❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

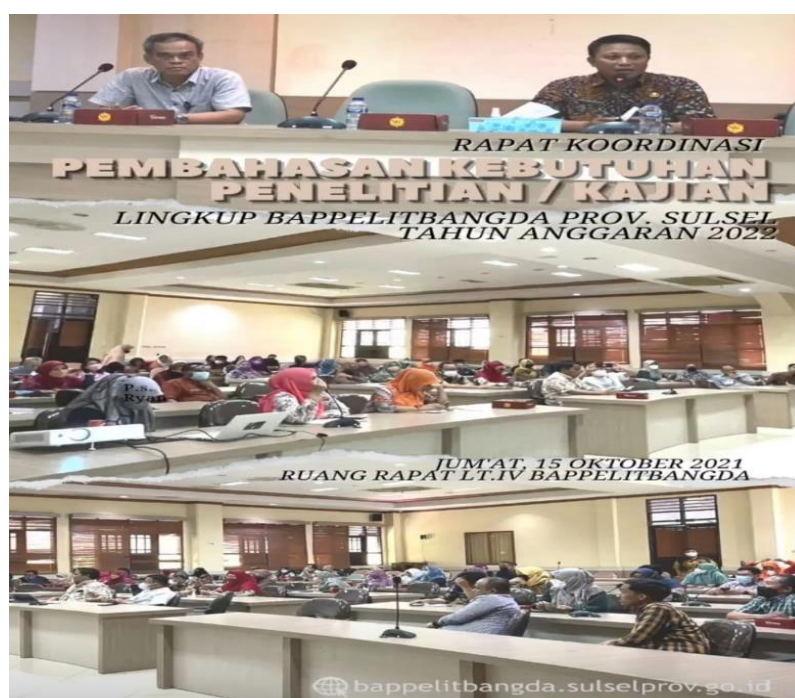
Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-2, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun ketiga

Renstra sudah hampir mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 40%, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut.

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan Rapat-rapat guna Evaluasi Program dan Kegiatan

Gambar 6



❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran ketiga ini didukung oleh **Program Pengendalian dan Pengembangan Daerah**.

Tabel 3.11

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	1. Program Pengendalian dan Pengembangan Daerah
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang

Sasaran	Program/ Kegiatan
	Sosial dan Kependudukan
	c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Rp. 4.375.028.600	Rp. 4.166.289.653	95,23%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.166.289.653,- atau 95,23% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,77% seperti yang digambarkan pada tabel 3.13

Tabel 3.13 Tingkat efisiensi sasaran ke-2

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	100	95,23	4,77

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi Daerah guna mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Berkembangnya jaringan dan kerjasama kelembagaan litbang dengan adanya Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011.
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda.

b. Permasalahan :

- Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu actual dan strategis.
- Belum adanya database inovasi daerah lingkup OPD Prov. Sulsel,
- Belum terdapatnya wali inovasi di setiap OPD.
- Belum maksimalnya respon dari pimpinan perangkat daerah dalam inovasi perangkat daerah.

Solusi :

- Membuat data base terkait kelitbangan dengan menyesuaikan dari isu actual dan strategis yang terjadi dewasa ini.
- Membuat sistem data base inovasi daerah yang ada di setiap OPD lingkup Pemerintah Prov. Sulsel.
- Sosialisasi terhadap pimpinan perangkat daerah akan pentingnya komitmen dari pimpinan dalam pengembangan inovasi.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong pengembangan penelitian dan inovasi daerah.

3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -3 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke – 3 ini menjadi sasaran yang berfokus di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran ke 3, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : 1. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)
2. Nilai SAKIP OPD
3. % Temuan Material

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Baseline 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (evaluasi Dokumen Perencanaan)	99,1%	95	146,22	$(146,28/95) \times 100$ % = 154%	97	151%
2.	Nilai Sakip OPD	80.04	80	80	$(80/80) \times 100\% = 100\%$	83	96%
3.	% Temuan Material	0.06	0,06	0,06	$(0,06/0,06) \times 100\% = 100\%$	0,05	100
Rata-rata Capaian Kinerja					118		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

➤ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)** sebesar **154%**.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar 146,22% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja pada masing-masing program yang terdapat di Bappelitbangda Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	%	100	100	100%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	0,5	0,68	136%	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
3.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang PPM	%	60	100	167	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	%	80	100	125	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	99,06	110	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%	3	11,32	377	Bidang Penelitian dan Pengembangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7.	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100	100	100	Sekretariat
8.	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100	100	100	
9.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	101,4	101	

- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip OPD** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP

Tahun 2021 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2021 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapat nilai 80 dengan capaian kinerja 100 %.

Disampaikan bahwa dalam hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda berdasarkan Hasil Evaluasi Sakip Bappelitbangda dengan nomor Surat 700.04/3757/A.1/Itprov tanggal 9 Agustus 2021 perihal Hasil Sakip Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Bappelitbangda Prov. Sulsel bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 80,04 dengan **kategori A** (Memuaskan). Dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Persentase Temuan Material** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021. Dikarenakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/049/A.1/Itprov bahwasanya pada tanggal 2 s.d 8 Februari 2022 untuk melakukan revidi atas Laporan keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, sehingga hasil dari revidi tersebut belum didapatkan. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2021 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada review Inspektorat sebesar-besarnya persentase temuan material tersebut adalah **0,06** dengan capaian kinerja 100 %.

❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Sasaran ke-3 Indikator 1 yaitu **Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah (evaluasi dokumen perencanaan)**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun ketiga Renstra sebesar 146,22% dengan capaian 154%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra

yang sebesar 97%, maka besar upaya kinerja Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja ini.

- b. Pada Sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Nilai Sakip OPD**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun kedua dan ketiga Renstra telah mendapatkan nilai SAKIP 80.04 atau **predikat A** dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83, maka Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan SAKIP, sehingga pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih atau bahkan melebihi dari target tahun terakhir Renstra Bappelitbangda.
- c. Pada Sasaran ke-3, Indikator 3 yaitu **% Temuan Material**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun ketiga Renstra sebesar 0,06 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 0,05, maka diharapkan pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih.
- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan Rapat-rapat guna Evaluasi Program dan Kegiatan

Gambar 7





❖ *Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya*

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran kedua ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.16

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	<i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	<i>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
	<i>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
	<i>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
	<i>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
	<i>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
<i>h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 38.318.791.132	Rp. 37.162.659.674	96,98%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.37.162.659.674,- atau 96,98% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 118%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 21,12% seperti yang digambarkan pada 3.18.

Tabel 3.18 Tingkat efisiensi sasaran ke-3

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	154		
	100		
	100		
Rata-rata Capaian Kinerja	118	96,98	21,12

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2021

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung

- Koordinasi dan Kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

b. Permasalahan

- Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.

Solusi

- Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan, baik dari kinerja maupun anggaran.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan rutin dalam hal pemeliharaan, pengadaan serta yang sifatnya pelayanan dilakukan pengukuran yang lebih terukur dengan pencapaian target kerja yang akan dicapai.

- Peningkatan kualitas SDM
- Terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.63.328.657.212,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.19 Target Belanja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Target	Prosent ase
1.	Belanja Operasi	Rp. 61.315.403.012,-	97%
1.1	Belanja Pegawai	Rp. 29.946.316.048,-	49%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 31.369.086.964	51%
2.	Belanja Modal	Rp. 2.040.214.200,-	3%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.480.924.200,-	73%
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 309.290.000,-	15%
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 250.000.000,-	12%
JUMLAH		Rp. 63.328.657.212,-	100%

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021

Adapun sumber pembiayaan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.20. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
	BELANJA DAERAH	63,355,617,212.00	59,835,877,467.00	3,519,739,745.00	100.00	94.44
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,318,791,132	37,162,659,674	1,156,131,458	100.00	96.98

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	684,218,000	565,344,678	118,873,322	100.00	82.63
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91,764,800	86,764,600	5,000,200	100.00	94.55
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	80,435,100	67,844,970	12,590,130	100.00	84.35
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	512,018,100	410,735,108	101,282,992	100.00	80.22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30,443,480,448	29,834,533,702	608,946,746	100.00	98.00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,946,316,048	29,377,678,615	568,637,433	100.00	98.10
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	382,379,000	342,589,687	39,789,313	100.00	89.59
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	114,785,400	114,265,400	520,000	100.00	99.55
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125,510,500	123,050,241	2,460,259	100.00	98.04
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17,021,500	17,005,261	16,239	100.00	99.90
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	108,489,000	106,044,980	2,444,020	100.00	97.75
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	477,391,000	466,986,731	10,404,269	100.00	97.82
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165,461,500	165,442,997	18,503	100.00	99.99
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138,208,000	138,093,720	114,280	100.00	99.92
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160,611,300	150,367,866	10,243,434	100.00	93.62
	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,110,200	13,082,148	28,052	100.00	99.79
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,639,469,700	1,537,177,002	102,292,698	100.00	93.76

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	183,433,500	163,633,714	19,799,786	100.00	89.21
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,784,800	228,105,116	21,679,684	100.00	91.32
3	Penyediaan Bahan/Material	15,227,000	15,222,361	4,639	100.00	99.97
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	391,014,000	388,417,142	2,596,858	100.00	99.34
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800,010,400	741,798,669	58,211,731	100.00	92.72
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,986,107,000	1,809,463,853	176,643,147	100.00	91.11
1	Pengadaan Aset Tak Berwujud	258,509,100	256,554,820	1,954,280	100.00	99.24
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317,919,000	312,541,694	5,377,306	100.00	98.31
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,409,678,900	1,240,367,339	169,311,561	100.00	87.99
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,250,000	38,728,711	5,521,289	100.00	87.52
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	13,317,121	4,682,879	100.00	73.98
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26,250,000	25,411,590	838,410	100.00	96.81
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,918,364,484	2,787,374,756	130,989,728	100.00	95.51
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	658,595,000	637,675,670	20,919,330	100.00	96.82
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	463,113,912	422,696,985	40,416,927	100.00	91.27
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	71,790,000	59,766,156	12,023,844	100.00	83.25

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)		
					Fisik	Keu	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,137,339,572	1,095,235,470	42,104,102	100.00	96.30
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	587,526,000	572,000,475	15,525,525	100.00	97.36
2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11,371,147,728	10,210,502,119	1,160,645,609	100.00	89.79
1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,343,627,700	2,123,010,648	220,617,052	100.00	90.59
	1	Koordinasi Penalaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	372,330,000	312,905,060	59,424,940	100.00	84.04
	2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1,971,297,700	1,810,105,588	161,192,112	100.00	91.82
2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	183,850,000	161,078,200	22,771,800	100.00	87.61
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	183,850,000	161,078,200	22,771,800	100.00	87.61
3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8,843,670,028	7,926,413,271	917,256,757	100.00	89.63
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	7,573,974,028	6,982,211,561	591,762,467	100.00	92.19
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	823,171,000	672,026,710	151,144,290	100.00	81.64
	3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	446,525,000	272,175,000	174,350,000	100.00	60.95
3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9,290,649,752	8,296,426,021	994,223,731	100.00	89.30

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	933,242,976	760,604,260	172,638,716	100.00	81.50
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100,771,300	86,543,900	14,227,400	100.00	85.88
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintah	107,836,500	88,032,233	19,804,267	100.00	81.63
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	174,779,676	134,589,563	40,190,113	100.00	77.01
4	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	222,379,000	164,037,271	58,341,729	100.00	73.76
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	213,432,000	196,322,451	17,109,549	100.00	91.98
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	114,044,500	91,078,842	22,965,658	100.00	79.86
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,818,386,400	1,569,112,023	249,274,377	100.00	86.29
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194,038,100	155,003,805	39,034,295	100.00	79.88
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	184,165,200	166,912,499	17,252,701	100.00	90.63

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	706,407,600	660,082,133	46,325,467	100.00	93.44
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	182,224,800	140,912,986	41,311,814	100.00	77.33
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	189,347,800	148,549,200	40,798,600	100.00	78.45
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	362,202,900	297,651,400	64,551,500	100.00	82.18
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	6,539,020,376	5,966,709,738	572,310,638	100.00	91.25
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97,519,976	62,800,173	34,719,803	100.00	64.40
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	161,621,100	118,382,675	43,238,425	100.00	73.25
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5,728,264,200	5,445,529,540	282,734,660	100.00	95.06
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94,354,100	66,478,700	27,875,400	100.00	70.46
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	132,248,100	82,368,100	49,880,000	100.00	62.28
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	325,012,900	191,150,550	133,862,350	100.00	58.81

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,375,028,600	4,166,289,653	208,738,947	100.00	95.23
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1,264,921,000	1,135,918,532	129,002,468	100.00	89.80
	1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1,156,248,500	1,046,020,765	110,227,735	100.00	90.47
	2 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	108,672,500	89,897,767	18,774,733	100.00	82.72
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	284,692,200	284,442,200	250,000	100.00	99.91
	1 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	284,692,200	284,442,200	250,000	100.00	99.91
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,775,219,000	1,749,200,560	26,018,440	100.00	98.53
	1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	286,440,500	278,254,500	8,186,000	100.00	97.14
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	704,680,500	694,468,060	10,212,440	100.00	98.55
	3 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	772,488,000	765,304,000	7,184,000	100.00	99.07
	4 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	11,610,000	11,174,000	436,000	100.00	96.24
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1,050,196,400	996,728,361	53,468,039	100.00	94.91
	1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	132,845,700	108,767,700	24,078,000	100.00	81.88
	2 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	77,804,000	74,264,000	3,540,000	100.00	95.45
	3 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	96,343,400	84,158,560	12,184,840	100.00	87.35

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
4	Fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	743,203,300	729,538,101	13,665,199	100.00	98.16

Sumber : Bappelitbangda Sulsel 2021

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
			TW 1	TW 1	TW 2	TW 2	TW 3	TW 3	TW 4	TW 4
1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd dan APBD	Persen	0	0	50	50	0	0	50	50
	- % peningkatan capaian kinerja program	Persen	0	0	0	0	0	0	0.50	3.68
1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- % Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Persen	0	0	0	0	0	0	100	100
a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0
b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	0	0
1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- % Ketersediaan dokumen data dan informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	%	0	0	0	0	0	0	100	100
a. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	Data	0	0	0	0	0	0	2,077	2,077
	- Jumlah sistem yang dipelihara	Sistem	0	0	0	0	0	0	2	2
	- jumlah kab/kota yang dibina	Kab/Kota	0	0	12	12	0	0	12	12
1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	- % Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0	0	0	0	0	0	100	100
	- Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	Kab/Kota	0	0	12	12	12	12	0	0
a. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan	- Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
pembangunan daerah di provinsi	Pengendalian/Evaluasi RPJPD dengan RPJMN									
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0
	- Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3
b Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	- Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
c fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	- Jumlah Fasilitasi (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	Rekomendasi	0	0	12	12	12	12	0	0
2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- % Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	persen	0	0	0	0	0	0	60	100
	- % Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	persen	0	0	0	0	0	0	80	100
	- % Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah	persen	0	0	90	99.06	0	0	0	0

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	5	5
	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	7	7
	- Jumlah Data dan Informasi Perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	8	8
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	- Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
b. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	4	4
c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	3	3
d. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	4	4
e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	- Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1
f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	- Jumlah dokumen penyusunan monitoring dan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
daerah bidang Pembangunan Manusia	evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's									
	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	2
2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	7	7
	- Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	10	10
	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	11	11
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	- Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	6	6
b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	5	5
c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	- Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	3	3
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	4	4
e. Pelaksanaan Monitoring dan	- Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	4

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian	n								
f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan SDA	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Pembangunan SDA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	4
2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Kewilayahan	Rekomendasi	0	0	3	3	0	0	3	3
	- Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dan kewilayahan	Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	25	25
	- Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	Rekomendasi	0	0	3	3	0	0	3	3
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	- Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rekomendasi	0	0	3	3	0	0	0	0
b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Kewilayahan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	3	3
c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	- Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rekomendasi	0	0	3	3	0	0	0	0
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan	- Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	3	3

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
daerah bidang Infrastruktur	perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur									
e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1
f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Kewilayahan	Dokumen	0	0	3	3	0	0	0	0
3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	- % Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	Persen	0	0	0	0	0	0	3	11.32
3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	3	3
a. Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	2	2
b. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	- Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	- Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
3.3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	5	5
a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
b. Penelitian dan Pengembangan, Pertanian, Perkebunan dan Pangan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	2	2
c. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	2	2
d. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
3.4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	OPD	0	0	0	0	0	0	11	17
a. Penelitian dan Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	1	1
	- Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dibangun	demplot	0	0	0	0	0	0	1	0
b. Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	- Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diseminasikan	Jenis	0	0	0	0	0	0	3	3
c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil kelitbangan	- Jumlah penelitian yang disosialisasikan	penelitian	0	0	0	0	0	0	7	7

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	- Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dn didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM	Produk	0	0	0	0	0	0	2	2
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- % Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	10.00	10.00	25.00	25.00	33.00	33.00	33.00	33.44
	- % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	Persen	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	- % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	0	0	1	2	1	Tercapai di tw 3
b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan perubahan yang tersusun	Dokumen	0	1	0	0	2	2	2	2
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	Dokumen	5	5	1	1	1	1	1	1
4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- % Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	30.00	100	38.00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Persen	25	25	25	25	25	25	25	25
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari : - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	Dokumen Kegiatan Dokumen	3 3 3	 3 3	 3 5	 3 5	 10 3	 3 3	 7 3	 3 3
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg tersusun	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- % Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	25	25	25		25		25	75
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBM	1	1	0	1	1	1	0	0
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	1
4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	persen	25	25	25	25	25	25	25	23
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	pasang	200	0	0	0	0	0	0	200
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya	pegawai	50	50	50	50	50	50	50	46
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	persen	25	25	25	0	25	25	25	50
d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Pegawai	0	0	0	0	200	200	0	0
4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	- % Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Persen	25	25	25	25	25	25	25	25
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	unit	3	13	3	6	3	6	3	3
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	- Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	3	16	3	6	3	6	3	3
c. Penyediaan Bahan/ Material	- Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	persen	0	0	0	0	0	0	100	100
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	75	75	75	150	75	160	75	75

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali	15	72	15	11	15	43	15	148
4.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25.00	8.33	25.00	8.33	25.00	25	25.00	58.34
a. Pengadaan Aset Tak Berwujud	- Jumlah Jenis Pengadaan aset tak berwujud	jenis	0	0	1	0	0	1	0	1
b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- % ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	%	50	0	50	0	0	100	0	0
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- % ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	25	25	25	25	25	25	25	25
4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- % Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	25.00	25.00	25.00	25	25.00	25	25.00	25
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	3	3	3	3	3	3	3	3
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	tahun	0	0	0	0	1	1	0	0
4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- % Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	25	21.88	25	20.83	25	25	25	32.29
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	4	10	4	4	4	6	4	4
	- Jumlah pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan	unit	3	8	3	5	3	2	3	8
	Jumlah pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	Unit	1	1	1		1	5	1	1
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Unit	1	0	1	2	1	4	1	7
	- Jumlah pajak kendaraan operasional roda 2 yang terbayarkan	unit	1	4		1				

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TW 1	REALISASI KINERJA TW 1	TARGET KINERJA TW 2	REALISASI KINERJA TW 2	TARGET KINERJA TW 3	REALISASI KINERJA TW 3	TARGET KINERJA TW 4	REALISASI KINERJA TW 4
	Jumlah pajak kendaraan operasional roda 4 yang terbayarkan	Unit	1	1				4		
c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Jenis	0	0	0	0	0	0	1	1
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Gedung	1	1	1	0	0	1	0	1
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Jenis	3	10	3	4	2	4	2	3

Bab IV berisi
1. Kesimpulan
2. Saran

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menyampaikan kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappelitbangda sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 adalah sebesar 107%.
2. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 94,44%.
3. Berdasarkan data kinerja dan data keuangan Bappelitbangda Tahun 2021, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,56%.
4. Secara umum, pencapaian target pada tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid 19 dan perubahan kebijakan di tingkat pusat. Selain hal tersebut, ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi serta penelitian daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan
 - Terdapat target sasaran Bappelitbangda pada tahun 2021 tidak berhasil dicapai karena faktor eksternal, yaitu terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak target kinerja program pembangunan perangkat daerah tidak tercapai
5. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai salah satu instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappelitbangda Sulawesi Selatan;
- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari pemerintah pusat, Kabupaten/kota, seluruh OPD dan stakeholder terkait, serta membuat kebijakan perencanaan yang efektif dalam menghadapi covid 19.
- Melakukan diseminasi tentang data pembangunan daerah kepada semua Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan

dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maju dan lebih baik.